

BAB II

Sudan, Rusia, dan Private Military Company

Bab ini akan mengulas beberapa aspek penting yang berkaitan dengan Sudan dan Rusia. Pembahasan dimulai dengan pengenalan kondisi politik, geografi, ekonomi, dan militer Sudan, serta perkembangan konflik internal antar etnis di negara tersebut. Selanjutnya, akan dijelaskan mengenai Rusia, termasuk identitasnya sebagai kekuatan besar dan tantangan ekonomi yang dihadapinya.

Bab ini juga akan membahas pengertian dan fungsi dari Private Military Companies (PMC), serta fokus pada pembentukan dan legalitas PMC Wagner Group yang digunakan oleh Rusia dalam menjalankan operasinya di Afrika.

2.1 Gambaran Umum Sudan dan Konflik Internalnya

2.1.1 Gambaran Umum Sudan

Saat ini, berbagai negara, termasuk Rusia telah menyadari pentingnya energi hingga menjadikannya isu global yang mendesak. Kebutuhan energi yang terus meningkat seringkali tidak sebanding dengan kemampuan produksi, menyebabkan tantangan besar bagi banyak negara dalam memastikan pasokan domestik yang stabil. Untuk mengatasi hal ini, banyak negara berusaha membangun kerjasama energi internasional guna memastikan ketersediaan pasokan dan memperkuat akses ke pasar global.

Salah satu kawasan yang sangat penting dalam konteks ini adalah Afrika, yang kaya akan sumber daya alam strategis. Benua ini menyimpan sekitar 30 persen cadangan mineral global, serta cadangan minyak dan gas alam yang signifikan. Selain itu, Afrika memiliki deposit logam penting seperti litium, yang

sangat dibutuhkan untuk teknologi penyimpanan baterai dan transisi menuju energi rendah karbon. Mengingat potensi besar tersebut, Afrika menjadi kunci bagi negara-negara yang ingin memperkuat ketahanan energi mereka di tingkat global.

Selain sumber dayanya yang melimpah, negara-negara di benua Afrika masih banyak mengalami pergolakan dalam internal negara tersebut seperti perang antar etnis di dalamnya untuk memperebutkan kekuasaan seperti yang ada di Libya, Suriah dan Sudan. Maka dari itu wilayah ini menjadi strategi bagi Rusia untuk hadir di sana melihat potensi Rusia di bidang keamanan yang memungkinkan untuk membantu konflik tersebut.

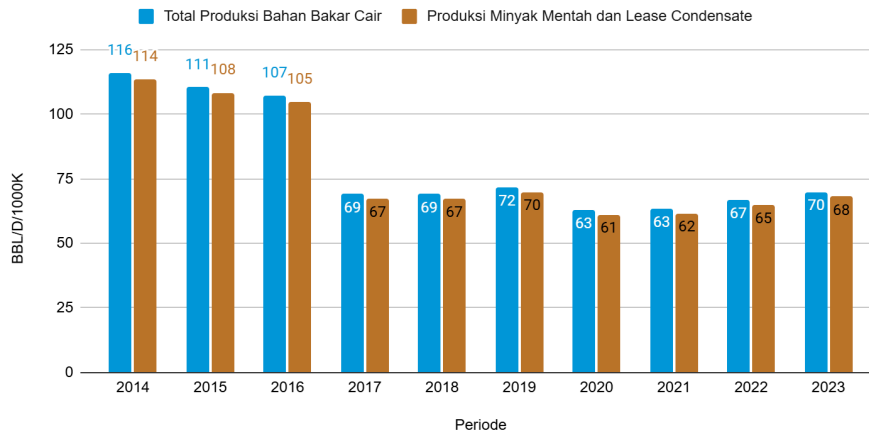
Dalam konteks ini, Sudan, yang terletak di timur laut Afrika, memainkan peran penting. Dengan luas wilayah 1.882.000 km², Sudan tercatat sebagai negara terbesar ketiga di Afrika dan berbatasan dengan tujuh negara, termasuk Mesir, Ethiopia, dan Libya. Negara ini memiliki cadangan sumber daya alam yang melimpah, serta keanekaragaman hayati yang tinggi. Secara geografis, Sudan menghubungkan Afrika dengan Timur Tengah melalui Laut Merah, menjadikannya titik penting dalam jalur perdagangan dan pengaruh politik regional. Keanekaragaman iklim, budaya, dan agama di Sudan menambah kompleksitasnya dalam peta geopolitik global (Kedutaan Besar Republik Sudan di Berlin, 2017).



Gambar 2.1 Peta negara Sudan dan beberapa negara yang berbatasan dengannya. Sumber: CIA World Factbook – Sudan

Sebagai negara dengan cadangan sumber daya alam yang melimpah, termasuk minyak mentah yang sebagian besar diproduksi di Cekungan Muglad dan Cekungan Melut. Sudan menghasilkan tiga jenis campuran minyak mentah: Dar, Nile, dan Fula. Campuran Dar adalah minyak mentah berat dengan kandungan sulfur rendah, namun memiliki tingkat asam yang tinggi, sehingga menyulitkan pemurnian. Campuran Nile, dengan kekentalan sedang dan kandungan lilin, lebih mudah diproses karena menghasilkan bahan bakar dan gasoil yang lebih banyak. Sedangkan Campuran Fula adalah minyak mentah yang sangat asam dan umumnya digunakan untuk konsumsi domestik (Sanders, 2012). Pada tahun 2023, produksi minyak Sudan tercatat sekitar 70.000 barel per hari, meskipun angka ini mengalami penurunan signifikan selama dekade terakhir akibat kurangnya eksplorasi dan pengembangan sektor hulu di negara tersebut.

Total Produksi Tahunan Minyak Bumi dan Cairan Lainnya di Sudan
Periode 2014–2023



Grafik 2.1 Data produksi minyak mentah Sudan per tahun 2019-2023 dengan sekian jumlah barel per hari per 1000 unit tertentu. Dikutip dari U.S. Energy Information Administration; International Energy Statistics Database and *Short-term Energy Outlook*

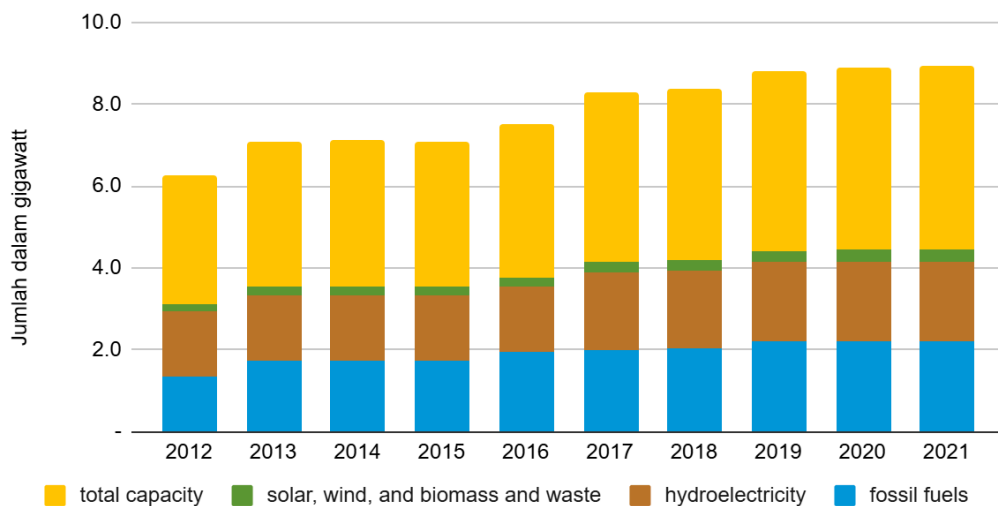
Selain minyak, Sudan juga memiliki potensi besar dalam bidang energi terbarukan, yang sebagian besar masih belum dimanfaatkan secara optimal. Pada tahun 2021, sekitar 43% dari total kapasitas pembangkitan listrik di Sudan berasal dari pembangkit listrik tenaga air, sementara sisanya, sekitar 57%, diperoleh dari sumber energi terbarukan, seperti tenaga surya dan biomassa. Meskipun jaringan listrik di Sudan terbatas, dengan 62% penduduknya memiliki akses listrik, potensi untuk mengembangkan energi terbarukan ini sangat besar, terutama dalam menghadapi tantangan pasokan energi di daerah-daerah pedesaan (Environment, 2017).

Potensi tenaga surya di Sudan juga sangat menjanjikan, mengingat negara ini memiliki tingkat sinar matahari yang tinggi sepanjang tahun. Sumber daya angin di sepanjang pantai Laut Merah dan di Negara Bagian Utara juga dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan energi yang lebih bersih dan berkelanjutan.

Meskipun saat ini sebagian besar tenaga terbarukan masih digunakan untuk solusi di luar jaringan, ada potensi besar untuk memperluas penggunaannya dalam skala yang lebih besar, baik untuk kebutuhan domestik maupun ekspor energi. Pemerintah Sudan telah mulai memprioritaskan investasi di sektor energi terbarukan untuk mendiversifikasi sumber energi negara dan mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil (Usui et al., 2024).

Kapasitas Listrik Sudan Berdasarkan Jenis Bahan Bakarnya

Periode 2012-2021



Grafik 2.2 Data kapasitas listrik Sudan berdasarkan jenis bahan bakarnya per tahun 2012-2021 dalam gigawatt. Dikutip dari U.S. Energy Information Administration; International Energy Statistics Database and *Short-term Energy Outlook*

Disamping kekayaan alam yang dimiliki Sudan, Sudan juga menghadapi konflik etnis yang berkepanjangan, yang telah menyebabkan ketidakstabilan mendalam di negara ini. Sejak merdeka pada 1956, Sudan terjat dalam sejumlah perang saudara, termasuk konflik besar di Darfur pada 2003, yang dipicu oleh kebijakan diskriminasi etnis dan kekerasan yang dilakukan oleh pemerintah Omar

al-Bashir. Di bawah kepemimpinan Al-Bashir, kebijakan kekerasan terhadap etnis non-Arab, yang meliputi genosida, pemerkosaan, dan pembunuhan massal, menyebabkan lebih dari 300.000 korban tewas dan jutaan orang mengungsi (Pradipta, D. M., 2014: 9).

Pada 2011, Sudan Selatan merdeka melalui referendum, namun ketegangan antara Sudan Utara dan Selatan tetap berlanjut. Perselisihan mengenai wilayah perbatasan dan kontrol atas sumber daya minyak yang bernilai tinggi semakin memperburuk hubungan antara kedua negara. Selain itu, Sudan juga dilanda ketegangan internal, dengan berbagai kelompok bersenjata dan konflik etnis yang menghambat pembangunan politik, ekonomi, dan sosialnya. Kegagalan upaya perdamaian dan perjanjian damai yang ada memperlihatkan bahwa konflik-konflik ini kemungkinan besar akan terus berlanjut, memperburuk ketidakstabilan yang sudah ada di Sudan (Putri Cahyanti et al., 2017).

Dari hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa Sudan memiliki posisi strategis yang sangat penting bagi Rusia, baik dalam aspek politik, ekonomi, maupun keamanan. Letaknya yang menghubungkan Afrika dengan Timur Tengah dan akses langsung ke Laut Merah menjadikannya jalur perdagangan dan militer yang vital. Rusia berencana membangun pangkalan militer di pantai Sudan, yang akan memperkuat kehadirannya di kawasan ini dan meningkatkan pengaruhnya di Afrika Utara dan Timur Tengah, di tengah persaingan global dengan negara-negara besar seperti Amerika Serikat dan China.

Selain itu, dengan kekuatan Rusia di bidang keamanan lebih mudah untuk Rusia menawarkan dukungan militer yang signifikan kepada Sudan, termasuk

pelatihan dan peralatan canggih. Melalui kerjasama militer ini, Rusia juga mendapatkan akses lebih besar ke sumber daya alam Sudan, seperti minyak, emas, dan mineral lainnya. Hal ini memberi Rusia kesempatan untuk memperluas pengaruhnya di kawasan tersebut baik secara ekonomi maupun geopolitik.

Kerjasama ini juga melibatkan keterlibatan grup paramiliter Rusia, seperti Wagner Group, yang memainkan peran penting dalam eksploitasi sumber daya alam di Sudan. Setelah bertahun-tahun konflik, Sudan membutuhkan dukungan internasional untuk rekonstruksi, dan Rusia melihat peluang untuk berinvestasi dalam infrastruktur serta sektor-sektor lain yang dapat memberikan keuntungan jangka panjang bagi kedua negara. Dengan demikian, hubungan Rusia-Sudan didorong oleh kepentingan strategis, ekonomi, dan politik yang saling menguntungkan, di mana Rusia berupaya memperkuat pengaruhnya di Afrika dan Timur Tengah, sembari menghadapi tantangan dari kekuatan Barat.

2.1.2 Sejarah Konflik Internal Sudan

Disamping sumber daya yang melimpah, Sudan memiliki konflik berkepanjangan yang bahkan hingga saat ini masih terus berjalan. Konflik di Sudan memiliki latar belakang yang sangat kompleks, bermula dari era kolonialisme hingga masa kemerdekaan pada 1956. Setelah merdeka, Sudan menghadapi dua periode perang saudara besar, yaitu Perang Saudara Pertama (1955–1972) dan Perang Saudara Kedua (1983–2005). Pada Perang Saudara Kedua, konflik dipicu oleh kebijakan pemerintah yang membatasi otonomi selatan serta penerapan hukum syariat Islam, yang menyebabkan masyarakat selatan merasa terdiskriminasi dan terpinggirkan. Di wilayah Darfur, ketegangan semakin

meningkat, khususnya karena adanya perbedaan pandangan antara etnis Arab dan non-Arab. Misalnya, pembagian wilayah yang membuat etnis Arab lebih banyak tinggal di utara yang subur, sementara keuntungan dari minyak di selatan lebih banyak digunakan untuk pembangunan di utara. Ketidakadilan ini memicu perang saudara pertama pada 1956, yang melibatkan suku Anya-nya dari Sudan Selatan, mayoritas etnis Afrika yang menganut Kristen dan animisme, melawan pemerintah. Konflik ini berakhir dengan Addis Ababa Agreement pada 1972, memberikan otonomi khusus di selatan (Collins 2006).

Omar al-Bashir, yang menjadi presiden Sudan sejak 1989, memainkan peran sentral dalam konflik ini. Sebagai seorang pemimpin yang dikenal dengan kediktatorannya, al-Bashir yang berasal dari etnis Arab, memimpin dengan cara yang sangat represif, dan kebijakannya semakin memperburuk ketegangan antara kelompok etnis Arab dan non-Arab. Pada tahun 2003, ketika kelompok Baggara (yang merupakan kelompok pastoral Arab) mulai menduduki wilayah Sudan, etnis Afrika yang tinggal di wilayah tersebut menentang mereka karena merasa terjajah oleh pendatang baru ini. Berbeda dengan pandangan masyarakat etnis Afrika, pemerintah Sudan justru menerima kelompok Baggara, karena mereka dianggap sebagai sesama etnis Arab. Langkah ini memperburuk ketidakadilan sosial dan ekonomi, serta menciptakan diskriminasi yang mendalam, yang semakin memperburuk ketegangan di negara tersebut.

Setelah kebijakan diskriminatif terhadap etnis non-Arab yang semakin intensif, Omar al-Bashir memaksa banyak kelompok non-Arab untuk mengungsi dari tanah mereka. Tindakan pemerintah ini tidak hanya berupa diskriminasi sosial

dan ekonomi, tetapi juga diiringi dengan kekerasan yang brutal, termasuk pembunuhan, pemerkosaan, mutilasi, dan perampasan hak-hak dasar lainnya. Kekejaman yang dilakukan oleh al-Bashir dianggap sebagai genosida, yang memicu pembentukan kelompok pemberontak dari kalangan etnis non-Arab, seperti Justice and Equality Movement (JEM) dan Sudanese Liberation Movement (SLM). Sebagai balasan terhadap pemberontakan tersebut, al-Bashir merekrut kelompok paramiliter Janjaweed, yang kemudian berkembang menjadi pasukan yang lebih terorganisir dan dikenal sebagai Rapid Support Forces (RSF). Konflik antara pemerintah Sudan, yang didukung oleh RSF, dengan kelompok pemberontak JEM dan SLM semakin memburuk, menghasilkan kematian sekitar 300 ribu orang, sebagian besar dari etnis non-Arab, serta menyebabkan lebih dari 2,5 juta orang kehilangan tempat tinggal. Tragedi ini memperburuk situasi kemanusiaan di Sudan, dengan dampak yang sangat luas dan mempengaruhi stabilitas negara secara keseluruhan (ICC Report, 2006).

Selama Perang Saudara Kedua, SPLA (Tentara Pembebasan Rakyat Sudan) muncul sebagai kekuatan utama dalam perlawanan terhadap pemerintah Sudan, memperjuangkan hak atas sumber daya dan perlakuan yang adil. Gerakan ini dipimpin oleh John Garang, yang kemudian digantikan oleh Salva Kiir Mayardit. Meskipun ada berbagai upaya untuk mencapai perdamaian, termasuk mediasi oleh Presiden Chad Idriss Déby pada 2003 dan Uni Afrika pada 2004, serta Perjanjian Damai Darfur pada 2006, SPLA tetap menolak perjanjian tersebut karena ketidakpuasan terhadap pembagian kekuasaan dan kompensasi yang dijanjikan (Cahyani, 2017).

Setelah Sudan Selatan merdeka, konflik di Sudan Utara tetap berlanjut, khususnya di wilayah Darfur. Pada 2003, pemberontakan pecah di Darfur sebagai respons terhadap diskriminasi dan ketidakadilan dari pemerintah terhadap penduduk lokal. Pemberontakan ini disertai oleh kekerasan brutal dari pasukan Janjaweed yang dipimpin oleh Muhammad Ahmad Abdullah. Pasukan Janjaweed ini kemudian bergabung dengan Angkatan Bersenjata Sudan (SAF), yang semakin memperburuk situasi di Darfur.

Omar al-Bashir, presiden Sudan pada waktu itu, menggunakan Janjaweed untuk menumpas pemberontakan, namun aksinya malah memperburuk situasi dan menyebabkan tragedi humaniora skala besar. Akibatnya, International Criminal Court (ICC) mengeluarkan tuduhan genosida terhadap Al Bashir. Hal ini juga memicu pembentukan Rapid Support Force (RSF) sebagai alternatif milisi tradisional seperti Janjaweed. RSF dipimpin oleh General Mohammed Hamadan Daglo alias Hemeti, yang sekarang menjadi tokoh kuat di balik kudeta militer terakhir di Sudan (Stephens, 2011).

Pada bulan April 2019, protes mahasiswa dan buruh di Khartoum meningkatkan tekanan terhadap rezim Al-Bashir hingga akhirnya ia turun dari jabatannya. Namun, transisi demokratis yang diharapkan gagal terwujud karena dominasi kubu militer yang tetap kuat. Pada Oktober 2021, terjadi kudeta militer yang dipimpin oleh Jenderal Abdel Fattah el-Burhan. El-Burhan mengklaim ingin mereformasi angkatan bersenjata, tetapi kenyataannya ia hanya memperlemah struktur pemerintahan sipil dan memperlebar jurang antara elit militer dan rakyat (Al Jazeera, 2021).

Sejak April 2023, konflik bereskalasi antara Angkatan Bersenjata Republik Sudan (SAFR) yang dipimpin oleh El-Burhan dan Pasukan Dukungan Cepat (RSF) yang dipimpin oleh Hemetti semakin memanas. Pertikaian ini tidak hanya melibatkan tentara profesional, tetapi juga para paramiliter yang ikut campur aduk. Akibatnya, terjadi kerusuhan massal yang menyebabkan puluhan ribu orang tewas, dan jutaan lainnya terpaksa melarikan diri demi keselamatan mereka. Krisis ini juga merusak infrastruktur dasar, seperti rumah sakit dan fasilitas umum lainnya, sehingga semakin menyulitkan korban untuk mendapatkan perlindungan darurat (Santosa, 2024).

2.2 Gambaran Umum dan Penurunan Keamanan Rusia sebagai *Great Power*

2.2.1 Gambaran Umum Rusia

Rusia, yang secara resmi dikenal sebagai Federasi Rusia, merupakan negara yang terletak di Eurasia Utara, Rusia membentang dari Eropa Timur hingga Asia Pasifik dimana wilayahnya terletak diantara dua benua yaitu Asia dan Eropa. Dengan luas daratan sebesar 16.376.870 km² (6.323.142 mil persegi), negara ini dinobatkan sebagai negara dengan wilayah terluas di dunia. Luas wilayahnya menyebabkan Rusia memiliki 11 zona waktu, dengan wilayah yang memiliki kondisi geografis serta kondisi iklim yang berbeda-beda di setiap daerah.

Di bagian utara, Rusia memiliki wilayah taiga yang dipenuhi hutan konifer lebat dengan iklim dingin, sementara di selatan terdapat stepa yang lebih kering dengan padang rumput yang luas. Di pesisir utara dan Siberia, suhu yang sangat rendah dan vegetasi terbatas mencirikan tundra, sedangkan sebagian besar

wilayah tengah Rusia dihiasi oleh hutan beriklim sedang. Di sisi selatan, terdapat gurun dengan iklim panas dan kering. Keragaman iklim dan lanskap yang meliputi taiga, stepa, tundra, hutan beriklim sedang, dan gurun menjadikan Rusia sebagai negara dengan ekosistem yang sangat beragam, mencerminkan keunikan alamnya yang luar biasa (Finlayson, 2019).



Gambar 2.2 Peta persebaran bioma Rusia.

Sumber: BBC, 2021

Dengan luas wilayah yang sangat besar, tentunya Rusia juga memiliki kekayaan yang melimpah mulai dari minyak dan gas hingga berbagai jenis mineral berharga seperti berlian yang juga menjadi salah satu sumber tulang punggung ekonomi Rusia. Karena kekayaan sumber daya alam yang dimilikinya, Rusia memainkan peran kunci dalam pasar energi global dan menjadi mitra dagang yang signifikan bagi negara-negara sekitarnya. Antara tahun 2000 hingga 2017, Rusia tercatat memiliki cadangan gas alam terbesar di dunia, cadangan batu bara terbesar kedua, dan cadangan minyak kedelapan terbesar. Selain itu, negara ini merupakan salah satu produsen gas alam terbesar, produsen minyak terbesar

ketiga, dan eksportir minyak terbesar kedua di dunia. Selain itu, potensi sumber daya laut di sepanjang garis pantai yang panjangnya mencapai 23.533 mil (37.653 km), termasuk Laut Arktik dan Pasifik, juga sangat menjanjikan (Kedutaan Besar Federasi Rusia di Selandia Baru, n.d.).

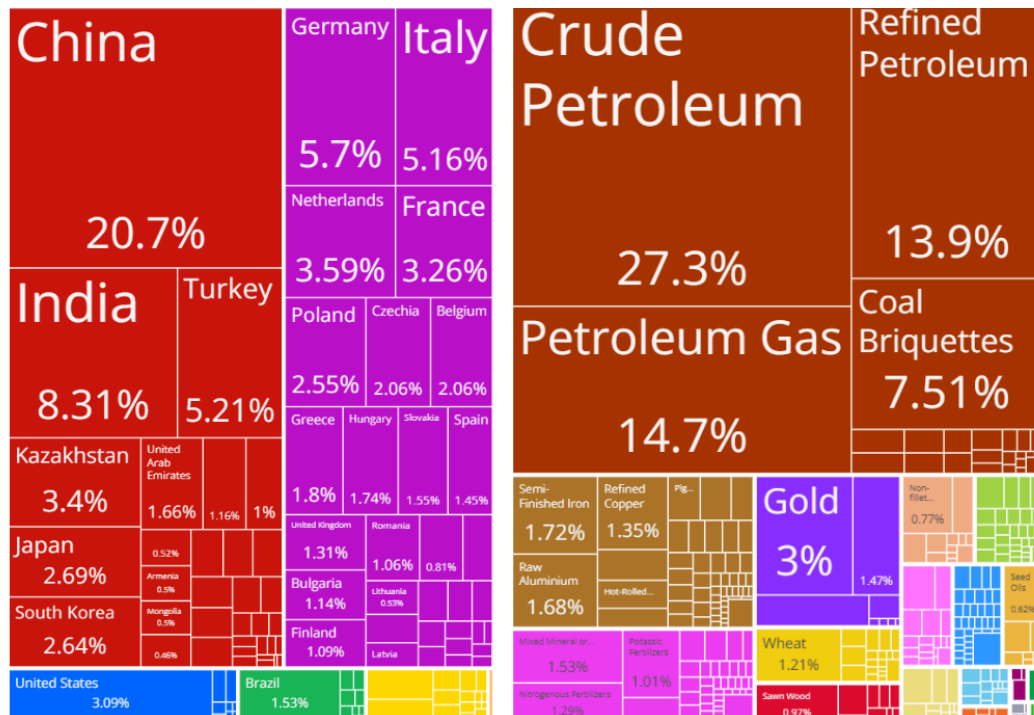
Rusia memiliki struktur ekonomi yang terdiversifikasi dengan sektor utama yang terdiri dari pertanian, industri, dan jasa. Sektor pertanian menyumbang sekitar 5,6% dari PDB negara ini, namun kondisi geografis yang sulit dan cuaca buruk membatasi pengembangan sektor ini. Pertanian di Rusia terdiri dari sektor formal yang dikuasai oleh produsen besar dan sektor informal yang lebih kecil, sering kali berorientasi pada pemenuhan kebutuhan domestik. Sektor formal ini berperan dalam produksi pangan untuk pasar, sementara sektor informal lebih berfokus pada pertanian kecil-kecilan yang ditujukan untuk konsumsi pribadi. Meski Rusia memiliki potensi besar dalam produksi pangan, negara ini justru mengimpor lebih banyak makanan daripada yang diekspor, karena faktor-faktor seperti inflasi yang lebih tinggi dibandingkan negara mitra dagangnya, sehingga harga pangan yang diimpor dari negara lain menjadi lebih murah.

Sektor industri Rusia, yang mencakup pertambangan, manufaktur, dan energi, memberikan kontribusi yang signifikan terhadap PDB, sekitar 30%. Rusia kaya akan sumber daya alam, dengan cadangan energi terbesar seperti minyak dan gas alam yang merupakan ekspor utama negara. Minyak dan gas alam berperan sangat penting dalam perekonomian, dengan Rusia menjadi salah satu produsen

minyak terbesar di dunia. Namun, sektor ini juga sangat bergantung pada kebijakan pemerintah yang mengontrol ekstraksi dan distribusi energi.

Sektor jasa kini menjadi kontributor terbesar terhadap ekonomi Rusia, menyumbang lebih dari 56% dari PDB dan mempekerjakan mayoritas penduduk negara tersebut. Layanan seperti perhotelan, konstruksi, dan perdagangan memainkan peran penting dalam perekonomian domestik. Meskipun pada awalnya sektor jasa berkembang setelah krisis pasca-Soviet, sektor ini terus tumbuh seiring meningkatnya permintaan domestik yang dipicu oleh pertumbuhan ekonomi yang stabil. Sektor jasa ini terus memperlihatkan dinamika positif meskipun Rusia bergantung kuat pada sektor energi dan industri untuk stabilitas ekonominya (BAJPAI, 2019).

Rusia, sebagai salah satu negara penghasil minyak dan gas terbesar, memanfaatkan kekayaan alamnya untuk memperkuat posisinya di kancah global, baik dalam hubungan ekonomi maupun diplomatik. Ketergantungan negara-negara besar seperti Eropa, Asia, serta negara-negara berkembang seperti China dan India terhadap energi Rusia memberikan leverage yang signifikan. Kekuatan ini mendukung stabilitas ekonomi Rusia dan memperkuat pengaruhnya dalam politik internasional. Pada tahun 2022, Rusia berada di peringkat ekonomi nomor 8 dunia berdasarkan PDB, dan menempati posisi kuat dalam ekspor serta indeks kompleksitas ekonomi, menunjukkan peran pentingnya di pasar global.



Gambar 2.3 Data persentase komoditas dan negara tujuan ekspor Rusia tahun 2022. Sumber: The Observatory of Economic Complexity (OEC): 2022

Rusia semakin memperluas pengaruhnya di Afrika dalam beberapa tahun terakhir, baik melalui hubungan ekonomi maupun politik. Sebagai produsen energi terbesar dunia, Rusia menawarkan kemitraan dalam sektor energi dan pertambangan, yang menjadi daya tarik utama bagi negara-negara Afrika yang kaya akan sumber daya alam. Negara-negara seperti Sudan, Zimbabwe, dan Angola menjadi mitra penting bagi Rusia, dengan kerjasama yang mencakup investasi infrastruktur dan penyediaan bantuan militer. Menurut data, Rusia meningkatkan ekspornya ke Afrika dengan nilai mencapai lebih dari \$20 miliar pada 2021, mencakup senjata, energi, dan teknologi. Selain itu, Rusia memanfaatkan hubungan ini untuk memperluas pengaruhnya dalam organisasi

internasional, dengan beberapa negara Afrika mendukung posisi Rusia dalam forum global.

2.2.2 Penurunan Ekonomi Rusia Pasca Invasinya ke Ukraina Sebagai Pendorong Pengiriman PMC ke Sudan

Sebelum menjadi negara independen, Rusia memiliki sejarah panjang dan kompleks. Saat ini, sesuai dengan amanat konstitusi yang diberlakukan pada tanggal 12 Desember 1993, Federasi Rusia ditetapkan sebagai negara hukum federatif yang menganut sistem pemerintahan republik, dengan kekuasaan pemerintahan tertinggi di tingkat federal dijalankan oleh Presiden, Parlemen (Majelis Federal), dan Pemerintah Pusat (Pemerintah Federasi Rusia). Rusia kini berada di bawah kepemimpinan Presiden Vladimir Putin, yang sudah memerintah selama beberapa dekade.

Sebagai bekas Uni Soviet, Rusia membawa warisan sebagai salah satu adidaya dunia. Menjadi salah satu negara yang memiliki kekuatan nuklir di dunia, Rusia juga memiliki kekuatan militer konvensional yang sangat tangguh. Menurut penilaian Global Firepower, kekuatan militer Rusia menempati peringkat kedua di dunia setelah Amerika Serikat. Dengan lebih dari 750.000 personel, 15.000 tank, 750 pesawat tempur/pengintai, 1.300 pesawat serangan sayap tetap, dan 350 kapal perang, Rusia memiliki armada militer yang sangat besar dan modern. Kemampuan militer Rusia yang luas ini mencakup berbagai jenis peralatan tempur canggih, seperti sistem pertahanan udara, rudal jelajah, dan platform tempur baru yang terus dikembangkan. Kekuatan militer yang signifikan ini, meskipun dapat digunakan untuk menjaga pengaruh global Rusia, juga menambah

ketegangan dengan negara-negara Barat, terutama di Eropa, yang merasa terancam oleh ambisi militer Moskow (Herbst, 2016: 165-166).

Ketegangan antara Rusia dan negara barat akhirnya terealisasi dan menjadi pertarungan antar *great power* di Ukraina. Pada tahun 2014 Rusia melakukan aneksasi terhadap wilayah krimea dan memberikan dukungan pada gerakan separatis yang dilakukan di wilayah Donbass Ukraina (Fischer, 2019). Secara singkat, gerakan separatis tersebut terjadi karena warga Rusia di Ukraina khawatir tidak mendapatkan dukungan yang sama dari Barat sehingga mereka menolak untuk berasosiasi dengan Barat dan memilih untuk memisahkan diri dari Ukraina. Hal ini menyebabkan konflik antara AS dan Rusia di Ukraina dimana kekuatan AS diwakilkan oleh pemerintah Ukraina dan Rusia diwakilkan oleh pihak separatis. Walaupun resolusi untuk konflik ini tidak dilanjutkan setelah tahun 2014, pada tahun 2021 Rusia terus melakukan peningkatan kekuatan militer dalam skala besar pada perbatasan Rusia-Ukraina (Center for Preventive Action, 2024).

Peningkatan kapasitas militernya memberi Kremlin sarana untuk bertindak melawan kepentingan AS dan NATO di Eropa. Putin telah menyatakan ketidakpuasannya pada banyak kesempatan mengenai status quo di Eropa dan Eurasia yang terbentuk pada akhir Perang Dingin. Dalam Bukunya yang berjudul “Why the Ukraine Crisis Is the West's Fault: The Liberal Delusions That Provoked Putin”, Mearsheimer (2014) menjelaskan bahwa Barat, terutama AS, telah menginvestasikan banyak sumber daya untuk mempromosikan nilai-nilai Barat dan demokrasi khususnya di kawasan Eropa Timur yang salah satunya

adalah Ukraina. Di Ukraina Sendiri, hal ini dilakukan dengan cara mendanai organisasi dan individu yang mendukung perubahan politik sesuai dengan kepentingan Barat. Mearsheimer juga berpendapat bahwa tujuan utama dari upaya ini adalah untuk membuat Ukraina menjadi negara yang pro-Barat, sehingga mengurangi pengaruh Rusia di kawasan tersebut. Ia juga menyebutkan bahwa upaya ini telah dilakukan sejak lama, bahkan sebelum konflik di Ukraina meletus. Salah satu organisasi yang berperan penting dalam upaya ini adalah *National Endowment for Democracy* (NED), yang memberikan dana untuk berbagai proyek di Ukraina.

Karena ketegangan yang terus mengalami peningkatan antara Rusia dan negara-negara barat, pada tahun 2022 ketegangan ini mengalami puncaknya dimana Rusia yang saat itu sedang dipimpin oleh Vladimir Putin memutuskan untuk melakukan invasi ke Ukraina secara besar-besaran. Pidato Vladimir Putin kepada Dewan Keamanan Rusia pada tanggal 1 Maret 2022 menggarisbawahi bahwa tujuan dari invasinya ke Ukraina adalah untuk menghancurkan "anti-Rusia" yang diciptakan oleh Barat. Kemarahan Putin terhadap Barat karena kurang menghormati Moskow memanifestasikan dirinya melalui penghancuran Ukraina secara membabi buta (Kuzio, 2022: 46).

Invasi ilegal dalam skala besar Rusia ke Ukraina menyulut kemarahan negara-negara di Eropa. Negara Anggota Uni Eropa dengan cepat bekerja sama dengan beberapa mitra termasuk Amerika Serikat, Inggris, Kanada, Australia, dan Jepang untuk menjatuhkan sanksi kepada Rusia. Dalam kurun waktu 18 bulan, setidaknya negara tersebut telah menjatuhkan 11 sanksi kepada Rusia yang diberi

nama 'sanctions revolution' dimana beberapa diantaranya menargetkan sektor-sektor utama ekonomi Rusia dan elit politik. Selain sanksi individu dan ekonomi, sejumlah sanksi diplomatik berikutnya telah diberlakukan, termasuk penangguhan fasilitasi visa antara UE dan Rusia. Sanksi baru juga telah diadopsi terhadap Belarus dan Iran, sebagai tanggapan atas keterlibatan mereka dalam perang agresi Rusia (European Parliament, 2023).

Sanksi-sanksi yang dijatuhkan Uni Eropa ke Rusia memang dirancang untuk melemahkan kemampuan ekonomi Rusia, terutama di sektor-sektor vital seperti energi, keuangan, dan perdagangan. Menurut laporan Dewan Uni Eropa, sanksi ini bertujuan untuk menghalangi Presiden Vladimir Putin dalam mencapai tujuan militernya di Ukraina dan terbukti berhasil melemahkan perekonomian Rusia secara signifikan. Selain sanksi yang telah disebutkan pada paragraf sebelumnya, terdapat sanksi tambahan yang juga diberikan oleh UE ke Rusia. Sanksi tersebut mencakup larangan ekspor teknologi, pembekuan aset bank-bank besar Rusia, dan larangan investasi di sektor-sektor strategis, yang semuanya berkontribusi pada penurunan akses Rusia terhadap pasar modal internasional dan teknologi canggih yang diperlukan untuk pertumbuhan ekonomi jangka panjang (Falahi, 2022).

Salah satu dampak paling mencolok dari sanksi ini adalah pembekuan sekitar 70% aset bank-bank Rusia, yang secara langsung mempengaruhi likuiditas dan kemampuan lembaga keuangan untuk beroperasi secara normal. Selain itu, larangan terhadap transaksi dengan lembaga-lembaga keuangan Rusia oleh negara-negara Barat juga telah mengurangi akses Rusia ke sistem pembayaran

internasional seperti SWIFT yang sangat penting untuk perdagangan global. Akibatnya, perekonomian Rusia mengalami kontraksi yang signifikan; Dana Moneter Internasional (IMF) melaporkan bahwa ekonomi Rusia menyusut sekitar 2,1% pada tahun 2022. Meskipun beberapa analisis mengindikasikan bahwa perekonomian Rusia menunjukkan tanda-tanda ketahanan, ancaman jangka panjang tetap ada karena sanksi ini dirancang untuk memberikan dampak kumulatif yang akan semakin memperburuk kondisi ekonomi seiring waktu (BBC, 2023).

Dampak lain dari sanksi UE juga terlihat dari penurunan investasi asing dan keluarnya perusahaan-perusahaan internasional dari pasar Rusia. Hal ini tidak hanya mengurangi akses Rusia terhadap teknologi dan inovasi baru tetapi juga menghambat pertumbuhan sektor-sektor penting seperti manufaktur dan layanan. Menurut laporan dari The Economist, banyak perusahaan asing yang sebelumnya beroperasi di Rusia terpaksa menutup operasi mereka atau beralih ke pasar lain, yang menyebabkan hilangnya lapangan kerja dan meningkatnya ketidakpastian ekonomi di kalangan masyarakat. Selain itu, pengurangan akses terhadap barang-barang impor berkualitas tinggi mempengaruhi daya saing produk domestik, yang semakin memperburuk kondisi ekonomi dalam negeri.

Dalam konteks sektor energi, sanksi Uni Eropa juga sangat berdampak pada pendapatan utama Rusia. Pendapatan dari minyak dan gas merupakan bagian besar dari anggaran negara, dan sanksi yang menargetkan sektor ini berpotensi mengurangi pendapatan pemerintah secara signifikan. Meskipun harga energi global mengalami lonjakan setelah invasi, batasan harga yang diberlakukan oleh

negara-negara Barat terhadap minyak Rusia dapat mengurangi pendapatan jangka panjang. Analisis memperkirakan bahwa defisit anggaran Rusia dapat mencapai rekor tertinggi akibat penurunan pendapatan dari sektor energi (VOA Indonesia, 2023). Hal ini menciptakan tekanan tambahan pada pemerintah untuk memotong pengeluaran atau meningkatkan utang publik, yang dapat berdampak negatif pada kesejahteraan sosial masyarakat.

Inflasi juga menjadi masalah serius bagi perekonomian Rusia pasca-invasi. Sanksi dan gangguan rantai pasokan telah menyebabkan lonjakan harga barang-barang konsumen. Inflasi tahunan mencapai 11,9% pada akhir 2022, mempengaruhi daya beli masyarakat secara langsung (Arbar, 2023). Masyarakat berpenghasilan rendah sangat merasakan dampak ini karena proporsi besar pengeluaran mereka dialokasikan untuk kebutuhan dasar seperti makanan dan energi. Dalam konteks ini, inflasi tidak hanya menjadi angka statistik tetapi juga menciptakan ketidakpuasan sosial yang dapat memicu protes atau ketidakstabilan politik di masa depan.

Di tengah tantangan ekonomi yang semakin kompleks, Rusia semakin memusatkan perhatian pada perluasan pengaruhnya di kawasan Afrika, yang dianggap memiliki potensi besar dalam mendongkrak perekonomian negara tersebut. Afrika, dengan kekayaan sumber daya alam yang melimpah dan pasar yang terus berkembang, menjadi kawasan strategis bagi Rusia untuk mencari peluang ekonomi baru. Sudan, sebagai salah satu negara dengan cadangan sumber daya alam yang kaya seperti emas, minyak, dan mineral langka lainnya, menjadi target utama dalam upaya Rusia untuk memperkuat perekonomiannya. Kehadiran

Rusia di Sudan tidak hanya dilihat sebagai langkah untuk memperluas pengaruh geopolitiknya, tetapi juga sebagai upaya untuk mendapatkan akses langsung ke kekayaan alam yang dapat memperbaiki kondisi ekonomi domestiknya, yang tertekan akibat sanksi internasional dan ketergantungan yang tinggi pada ekspor energi.

Rusia, yang telah menghadapi dampak signifikan dari sanksi internasional setelah invasi ke Ukraina, membutuhkan diversifikasi sumber daya ekonomi dan pengurangan ketergantungan pada negara-negara Barat. Dengan memperkuat posisinya di Sudan, Rusia berusaha mengakses sumber daya mineral yang sangat dibutuhkan untuk menopang industri domestiknya, serta meningkatkan keberadaannya sebagai pemain utama dalam perdagangan mineral global. Pengiriman Wagner Group ke Sudan, sebuah kelompok militer swasta yang memiliki kedekatan erat dengan pemerintah Rusia, mencerminkan pendekatan Rusia yang menggabungkan instrumen militer dan ekonomi untuk mencapai tujuan tersebut. Melalui operasi ini, Rusia tidak hanya berusaha menciptakan stabilitas keamanan di Sudan tetapi juga mendapatkan posisi strategis dalam mengelola dan mengeksploitasi sumber daya alam di negara tersebut, yang pada gilirannya akan memperkuat posisi ekonomi Rusia di pasar global.

Dengan demikian, kehadiran Rusia di Sudan menjadi bagian integral dari strategi besar Rusia untuk mengamankan akses ke sumber daya vital dan memperluas pengaruh ekonominya di kawasan yang semakin diperebutkan oleh kekuatan besar lainnya. Pengiriman Wagner Group ke Sudan menunjukkan bagaimana Rusia menggunakan alat militer dan ekonomi secara bersamaan untuk

meraih keuntungan ekonomi, yang dapat memberikan dampak langsung terhadap perbaikan sektor-sektor strategis domestik dan memperkuat posisi Rusia sebagai aktor penting dalam dinamika politik dan ekonomi global.

2.3 Perusahaan Militer Swasta dan Wagner Group

2.3.1 Definisi dan Fungsi Perusahaan Militer Swasta

Private military companies (PMC) atau yang dalam bahasa Indonesia disebut dengan perusahaan militer swasta merupakan perusahaan yang memiliki spesialisasi dalam kegiatan militer, termasuk pertempuran, intelijen, pelatihan, logistik, dan pengadaan senjata. Organisasi ini berfokus pada penyediaan perlindungan bagi personel dan properti, termasuk aset kemanusiaan dan industri. Dari jasa yang telah ia berikan kepada baik pemerintah, lembaga internasional, maupun penjahat tersebut, PMC ini kemudian menetapkan harga tertentu atas jasa yang telah diberikan (Schreier & Caparini, 2005, 2). Menurut Montreux Document (2009), instrumen hukum internasional pertama yang membahas secara khusus hukum terkait Private Military Companies (PMC), menjelaskan bahwa definisi dari PMC adalah entitas bisnis yang menyediakan jasa keamanan atau militer, termasuk dengan pengawalan bersenjata, perlindungan terhadap orang, benda, konvoi, dan bangunan, pemeliharaan, dan pengoperasian sistem senjata, penjagaan tahanan, serta pelatihan pasukan lokal dan personel keamanan. Perusahaan Militer Swasta (PMS) merupakan entitas komersial yang khusus menyediakan jasa keamanan dan militer.

Menambahkan dari definisi sebelumnya, Spear (2006, 7) menjelaskan bahwa PMCs merupakan entitas yang menyediakan jasa militer dan layanan

profesional lainnya yang dibutuhkan dalam konflik maupun peperangan. “Layanan profesional lainnya” yang ditawarkan oleh PMCs sangat beragam dan dalam beberapa kasus, layanan yang ditawarkan mirip dengan tentara bayaran. Selanjutnya, Singer (2001, 2) mendefinisikan PMCs sebagai perusahaan yang memiliki spesialisasi dalam penyediaan berbagai layanan militer seperti perencanaan strategi, pengumpulan informasi, pelatihan pasukan, dan dukungan teknis. Aktivitas perusahaan-perusahaan ini sangat beragam, dan daftar yang diberikan oleh Singer tidak mencakup semua layanan yang mereka tawarkan. Sebagai perusahaan, mereka perlu menawarkan berbagai layanan untuk meningkatkan pendapatan mereka.

PMS juga beroperasi di bawah kerangka hukum yang lebih terdefinisi. Model bisnis PMS umumnya melibatkan perekrutan individu dengan latar belakang militer atau keamanan untuk melaksanakan berbagai tugas, mulai dari pelatihan hingga operasi lapangan. Fleksibilitas operasional PMS memungkinkan mereka beroperasi lintas negara dengan struktur korporasi yang kompleks, termasuk pembentukan perusahaan induk dan anak perusahaan. Selain itu, beberapa PMS memilih untuk beroperasi di yurisdiksi dengan regulasi yang lebih lunak untuk melindungi aset perusahaan dari potensi risiko hukum.

Pada hakikatnya tentara bayaran dan PMC berbeda baik secara substansi maupun wujudnya. Wright dan Brooke, menjelaskan bahwa PMCs telah terbukti efektif dalam restorasi perdamaian dan keamanan dan menyebut mereka sebagai ‘industri operasi perdamaian dan stabilitas’. Namun sebaliknya tentara bayaran memiliki prinsip-prinsip yang bertentangan dengan industri tersebut (Baker &

Gumedze, 2007, 1). Selanjutnya Baker dan Gomedze menjelaskan bahwa tentara bayaran telah mengganggu perdamaian dan keamanan di Afrika, serta merusak hak-hak asasi manusia. Meskipun terdapat upaya untuk memperbaiki sektor keamanan di negara tersebut, kenyataannya konflik-konflik yang melibatkan perusahaan keamanan militer swasta dan tentara bayaran masih terus terjadi. Tidak diragukan lagi bahwa aktivitas dari tentara bayaran terus mengganggu stabilitas di benua Afrika, meskipun perusahaan keamanan militer swasta berusaha untuk membangun reputasi sebagai penyedia layanan yang sah.

Istilah "perusahaan militer swasta" sulit didefinisikan secara pasti. Banyak yang menganggapnya sama dengan "tentara bayaran" baik dari segi kegiatan maupun secara hukum. Namun, upaya untuk mengklasifikasikan perusahaan semacam ini terus dilakukan. Misalnya, Geneva Centre for Democratic Control of Armed Forces (DCAF) membedakan perusahaan militer swasta yang bersifat ofensif dengan perusahaan keamanan swasta yang bersifat defensif. Selain itu, ada juga pendekatan yang melihat seberapa dekat perusahaan beroperasi dengan medan perang. Meskipun demikian, masih sulit untuk memberikan definisi yang tegas, terutama terkait dengan dukungan logistik dan teknis (Senekal, 2012).

2.3.2 Sejarah Terbentuknya PMC Wagner Group

Sejak berakhirnya Perang Dingin, penggunaan dari PMC menjadi populer karena PMC dapat menjadi alternatif yang lebih menguntungkan karena mereka menawarkan jasa yang dapat menyesuaikan keadaan, biaya yang lebih terjangkau, dan kemampuannya yang seringkali melebihi pasukan militer pada umumnya. Meskipun terdapat larangan secara resmi terkait keberadaan PMC, Rusia telah

mengembangkan jaringan luas perusahaan keamanan swasta yang beroperasi dalam berbagai sektor, mulai dari perlindungan VIP hingga penjagaan infrastruktur. Namun demikian, penggunaan dari PMC sendiri sangat terlihat pada konflik bersenjata seperti yang ada di Suriah dan Ukraina (CSIS, 2020).



Gambar 2.4 Yevgeny Prigozhin dan tentara Wagner Group yang sedang memegang bendera Wagner dan bendera Rusia di Bakhmut. Para tentara bayaran telah menyiapkan garis pertahanan di pinggiran barat Bakhmut sebelum rencana penyerahan kendali kepada tentara Rusia. Sumber: Reuters (2023)

Selanjutnya, CSIS juga menjelaskan bahwa penggunaan perusahaan militer swasta (PMC) oleh Rusia merupakan cerminan dari strategi adaptasi Rusia dalam menanggapi perubahan-perubahan pada struktur internasional pasca-Perang Dingin. Sejarah panjang Uni Soviet dalam mengoperasikan pasukan proxy dan menjalankan operasi rahasia di negara lain telah memberikan fondasi bagi pengembangan PMC sebagai alat untuk mencapai tujuan politik tanpa melibatkan militer reguler secara langsung. Dengan melibatkan PMC, Rusia dapat melakukan intervensi di berbagai wilayah dengan risiko politik yang lebih rendah, sekaligus mempertahankan tingkat penyangkalan yang tinggi. Pengalaman Rusia dalam

konflik-konflik pasca-Soviet, serta pengamatan terhadap praktik negara-negara Barat, telah memperkaya pemahaman Moskow tentang potensi dan tantangan dalam penggunaan PMC. Namun, penggunaan PMC juga menimbulkan sejumlah pertanyaan serius terkait akuntabilitas, transparansi, dan potensi pelanggaran hukum humaniter internasional. Hal inilah yang menjadikan penggunaan PMC menjadi perdebatan di lingkup keamanan internasional.

Wagner Group, salah satu PMC yang sangat dekat dengan pemerintah Rusia, pada dasarnya merupakan sebuah mekanisme kontrak semi-negara yang digunakan oleh angkatan bersenjata Rusia untuk berbagai proyek militer. PMC (perusahaan militer swasta) Wagner didirikan sebagai badan hukum di Rusia pada bulan Desember 2022, tetapi aktivitas kelompok tentara bayaran tersebut telah ada sejak hampir satu dekade sebelum pendirian resminya. Karena Wagner telah menghabiskan sebagian besar keberadaannya di area abu-abu yang dapat disangkal, asal-usul dan struktur organisasinya, menurut rancangannya, tidak jelas.



Gambar 2.5 Atribut dan simbol-simbol khas Grup Wagner yang berfungsi sebagai identitas kelompok. Sumber: Arab Center Washington DC (2023)

Kisah paling kredibel tentang pembentukan kelompok tersebut melibatkan Dmitry Utkin, mantan perwira GRU dan Spetsnaz, dan perusahaan tentara

bayaran yang berumur pendek bernama Slavonic Corps. Korps Slavia dibentuk pada tahun 2013 untuk memberikan dukungan bagi rezim Bashar al-Assad selama Perang Saudara Suriah, tetapi unit tersebut dikalahkan dalam pertempuran pertamanya, yaitu bentrokan dengan pejuang Negara Islam (ISIL) di luar Homs pada bulan Oktober 2013. Pada awal tahun 2014, Utkin bergabung dengan perusahaan tentara bayaran yang didukung GRU yang sebagian anggotanya berasal dari Korps Slavia, dan namanya—Wagner—dilaporkan berasal dari tanda panggilan radio Utkin sebelumnya. Pada saat inilah Wagner Group mulai terbentuk. Dokumen pendirian grup, tertanggal 1 Mei 2014, menetapkan Utkin sebagai "komandan," yang bertanggung jawab atas pelatihan, perekrutan, dan pendisiplinan, dan menunjuk Yevgeny Prigozhin sebagai "direktur," yang bertugas mengamankan senjata dan pendanaan, serta melindungi personel dari hukum Rusia yang melarang kerja tentara bayaran.

Prigozhin adalah seorang oligarki dengan masa lalu yang kelam; ia menghabiskan sebagian besar tahun 1980-an di penjara atas tuduhan perampokan dan perampokan bersenjata. Setelah dibebaskan pada tahun 1990, Prigozhin membuka jaringan kedai hot dog di St. Petersburg yang akhirnya ia ubah menjadi restoran dan perusahaan katering yang cukup besar. Restoran-restoran Prigozhin sering dikunjungi oleh elit bisnis dan politik St. Petersburg pasca-Soviet . Pada suatu saat selama periode ini, Prigozhin menjalin hubungan dengan Putin, yang basis kekuatan pribadinya terletak di kota itu, dan Prigozhin diuntungkan oleh kebangkitan Putin. Lama-kelamaan Prigozhin mendapat julukan “koki Putin”, dan

aksesnya terhadap kontrak katering pemerintah membuatnya sangat kaya (Ray, 2023).

Grup Wagner memiliki hubungan yang sangat erat dengan pasukan militer Rusia serta badan intelijen militernya, Direktorat Intelijen Utama (GRU), dan kemungkinan besar merupakan organisasi yang dibentuk oleh GRU. Komandan pertama Wagner, Dmitry Utkin, adalah mantan perwira pasukan khusus GRU yang bekerja sama dengan pemerintah Rusia dalam mengerahkan grup ini ke Ukraina Timur dan Suriah pada tahun 2014 dan 2015. Utkin juga tewas dalam kecelakaan pesawat yang menewaskan Yevgeny Prigozhin pada Agustus 2023. Sejak 2015, basis pelatihan utama Wagner yang dapat terlihat dalam citra satelit terletak dekat dengan basis Brigade Misi Khusus ke-10 Spetsnaz GRU di Molmino, Krasnodar, yang dilaporkan ditutup pada Juli 2023. Selain itu, operasi Wagner di Afrika juga melibatkan penggunaan pesawat militer Rusia untuk mengangkut pasukan dan kargo melalui pangkalan udara Khmeimim di Suriah. Menurut Kementerian Pertahanan Inggris, aktivitas Wagner Group dan militer Rusia tampaknya sangat terjalin, dengan Wagner sering kali memperkuat pasukan militer Rusia di beberapa wilayah. Hubungan ini yang semakin jelas mendorong Departemen Keuangan AS untuk mengidentifikasi Wagner sebagai "pasukan proxy Kementerian Pertahanan Rusia yang ditunjuk", yang menunjukkan bahwa grup ini beroperasi berdasarkan permintaan dan arahan langsung dari pemerintah Rusia (Marten et al., 2023: 3).

2.3.3 Legalitas PMC Wagner Group

Penggunaan perusahaan militer swasta (PMC) semakin mendapat perhatian dalam beberapa dekade terakhir, meskipun praktik ini sudah ada sejak berabad-abad lalu. Setelah berakhirnya Perang Dingin, perusahaan-perusahaan militer swasta mengalami pertumbuhan pesat dan kini menjadi industri yang sangat menguntungkan. Mereka menawarkan layanan keamanan kepada pemerintah, perusahaan, dan berbagai entitas lain, serta berperan sebagai aktor strategis dalam operasi global, terutama di kawasan yang dilanda konflik atau ketidakstabilan politik (Ahmedi & Ahmeti, 2018: 45). Dalam kebijakan pertahanan, PMS semakin penting karena fleksibilitas dan efisiensi biaya yang mereka tawarkan. Hal ini memungkinkan negara untuk mengoptimalkan sumber daya dalam menghadapi tantangan keamanan yang kompleks. Pemerintah sering mengontrak PMS untuk melakukan tugas-tugas yang sulit dijalankan oleh angkatan bersenjata konvensional, seperti operasi di wilayah dengan risiko tinggi atau dalam kondisi yang sangat sensitif.

Namun, Menurut Stryzhak & Filianina (2019) dalam Sarjito (2023: 36) pengalihan tugas militer kepada PMS menimbulkan berbagai kekhawatiran terkait dengan akuntabilitas dan pengawasan. PMS beroperasi di "zona abu-abu" antara sektor publik dan swasta, sehingga seringkali sulit untuk membedakan antara tindakan mereka dan tindakan militer resmi. Mereka sering terlibat dalam kegiatan yang kontroversial, seperti pelatihan militer dan operasi intelijen, yang menimbulkan potensi konflik kepentingan. Selain itu, PMS juga kerap dituduh melanggar hak asasi manusia dan terlibat dalam aktivitas yang tidak etis, yang

menambah kekhawatiran mengenai transparansi, penggunaan kekuatan, dan pelanggaran hak asasi manusia. Fenomena ini memperburuk ketergantungan negara pada layanan mereka, dengan biaya yang tinggi dan lobi intensif yang dilakukan oleh PMS untuk mendapatkan kontrak yang menguntungkan (Leander, 2005: 612 & 618).

Hukum Humaniter Internasional, melalui Pasal 50 ayat (1) Protokol Tambahan I Konvensi Jenewa 1977, menyatakan bahwa warga sipil adalah individu yang tidak termasuk dalam kategori yang diatur dalam Pasal 4A ayat (1), (2), (3), dan (6) serta Pasal 43 Protokol Tambahan I 1977 dan Konvensi Jenewa III 1949. Dalam hal ini, jika terdapat keraguan mengenai status seseorang sebagai warga sipil atau bukan, maka orang tersebut harus dianggap sebagai warga sipil dan berhak mendapatkan perlindungan dari ancaman militer. Oleh karena itu, jika kontraktor dari perusahaan militer swasta (PMSC) tidak terlibat dalam tugas-tugas yang diatur dalam pasal-pasal tersebut, mereka dianggap sebagai warga sipil yang berhak mendapatkan perlindungan. Selain itu, ada pula kategori *civilian accompanying the armed forces* (warga sipil yang menyertai angkatan bersenjata), yang merupakan individu yang tidak terlibat langsung dalam pertempuran atau operasi militer bersenjata. Mereka berperan dalam fungsi non-tempur, seperti perawatan peralatan militer, penyediaan logistik, juru masak, petugas rekonstruksi markas, atau petugas medis.

Di sisi lain, di Rusia, meskipun Presiden Vladimir Putin menyatakan bahwa negara tersebut tidak memiliki dasar hukum untuk eksistensi tentara bayaran dan bahwa aktivitas tersebut dilarang oleh Kitab Undang-Undang Hukum

Pidana Rusia, Wagner Group tetap beroperasi dengan dukungan dari pemerintah. Hal ini menimbulkan ketidakjelasan mengenai status hukum mereka. Wagner Group sering kali berfungsi sebagai instrumen negara untuk mencapai tujuan strategis tanpa terikat pada regulasi yang sama dengan angkatan bersenjata resmi. Meskipun keberadaan mereka secara hukum masih diperdebatkan, penggunaan PMC seperti Wagner dapat dipandang sebagai langkah pragmatis bagi Rusia dalam menghadapi tantangan internasional, terutama dalam konteks kebijakan luar negeri dan keamanan nasional yang kompleks.

Dari perspektif neorealisme ofensif, yang melihat sistem internasional sebagai anarki, keberadaan perusahaan militer swasta (PMC) seperti Wagner Group dapat dianggap sah. Dalam pandangan ini, negara-negara besar berusaha memperkuat kekuatan dan keamanan mereka dengan cara yang agresif untuk mencapai hegemoni regional atau global (Mearsheimer, 2014: 363). Rusia memanfaatkan Wagner untuk memperluas pengaruhnya di kawasan strategis seperti Afrika dan Eropa Timur, di mana penggunaan angkatan bersenjata konvensional mungkin lebih sulit dilakukan. Dengan mengandalkan PMC, Rusia dapat menghindari tanggung jawab langsung atas tindakan yang dilakukan oleh pasukan bayaran tersebut, sambil tetap mempertahankan kontrol atas operasi militer dan politik di wilayah-wilayah tersebut. Oleh karena itu, meskipun legalitas penggunaan Wagner Group diperdebatkan, dalam kerangka neorealisme ofensif, strategi ini dianggap sah dan efektif untuk mencapai tujuan geopolitik Rusia.

Meski kontroversial, penggunaan PMC dalam operasi militer kini semakin diterima sebagai alat sah dalam konteks tertentu, baik menurut hukum internasional maupun hukum domestik. Negara-negara besar, seperti Rusia dan Amerika Serikat, telah menjadikan penggunaan PMC sebagai bagian dari strategi pertahanan dan politik luar negeri mereka. Meskipun terdapat tantangan terkait transparansi dan akuntabilitas, penerimaan terhadap penggunaan PMC semakin berkembang sebagai alternatif untuk memperkuat kekuatan negara di luar regulasi ketat angkatan bersenjata resmi. Dalam kerangka geopolitik global yang semakin kompleks, keberadaan PMC seperti Wagner Group memungkinkan negara-negara besar untuk memperluas pengaruh mereka sambil menghindari batasan hukum yang lebih ketat yang berlaku untuk militer konvensional.